

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya tidak jauh dari sebuah permasalahan yang bernama kemiskinan. Kemiskinan menjadi sebuah topik yang harus diperhatikan sebab kemiskinan dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya terkait menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat yakni merata secara spiritual dan material. Tingkat kemiskinan yang tak terbendung, dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi, pendidikan, maupun sosial seperti meningkatnya PSK (Pekerja Seks Komersial), pemukiman kumuh, anak jalanan atau gelandangan yang mayoritas merupakan anak putus sekolah, serta meningkatnya tingkat kejahatan. Oleh karenanya, kemiskinan termasuk sasaran pembangunan yang perlu untuk dilakukan evaluasi secara berkala. Kemiskinan masih menjadi masalah kompleks yang pemecahannya tidak mudah pada tiap-tiap daerah di Indonesia serta berbagai kebijakan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan hingga kini juga masih terus dikaji.

Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia merupakan memiliki peranan besar terhadap perekonomian, baik bagi pulau Jawa

maupun Indonesia. Menurut BPS Provinsi Jawa Barat, peranan perekonomian Jawa Barat terhadap nasional adalah sebesar 14.07%, sedangkan peranan perekonomian Jawa Barat terhadap pulau Jawa yaitu 24.41% di tahun 2019. Informasi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perekonomian Jawa Barat dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Kemajuan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB kontribusi 9 sektor ekonomi, dan nilai laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat. Jika dilihat secara geografis provinsi Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat strategis bagian internal dari perekonomian nasional, karena berdekatan langsung dengan provinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian Indonesia. Walaupun provinsi Jawa Barat dapat dikatakan memiliki lokasi yang strategis dan menjadi daerah potensi pengembangan perekonomian di Indonesia, tingkat taraf kemiskinannya bisa dikatakan masih cukup tinggi. Hal ini tercermin pada data BPS Jawa Barat yang dirilis pada bulan Maret 2020, yakni tingkat kemiskinan di Jawa Barat sampai bulan Maret tercatat sebesar 3.92% atau terjadi peningkatan dari 3.38% pada tahun sebelumnya. Untuk itu, perlu diketahui faktor apa saja yang mendasarinya dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut, sehingga bisa ditentukan solusi yang tepat untuk menurunkan tingkat kemiskinan khususnya di Jawa Barat.

World Bank (2004) dalam Whisnu Adhi Saputra (2011) memaparkan, sebuah penyebab kemiskinan ialah pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) yang kurang untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasar semacam perumahan,

pakaian, makanan, serta taraf pendidikan dan kesehatan yang bisa diterima (*acceptable*). Oleh karenanya, besarnya tingkat kemiskinan biasanya searah dengan tingkat pengangguran, karena seringkali mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan dan otomatis tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Berikut adalah data mengenai tingkat kemiskinan di pulau Jawa tahun 2014-2019:

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali periode 2014- 2019
(dalam%)

Provinsi	Periode Tahun						Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
DKI Jakarta	8.01	7.54	7.50	7.55	7.12	6.89	7.44
Jawa Barat	18.62	19.10	17.72	16.54	14.70	13.73	16.74
Banten	10.86	11.65	10.78	11.04	10.49	10.03	10.81
Jawa Tengah	28.04	26.90	26.46	25.24	22.51	21.38	25.09
DI Yogyakarta	29.55	28.07	26.44	25.38	23.94	23.14	26.09
Jawa Timur	24.7	24.62	23.90	22.97	21.83	20.57	23.10
Bali	9.29	9.99	8.40	8.39	7.92	7.40	8.57

Sumber: BPS, yang diolah (2020)

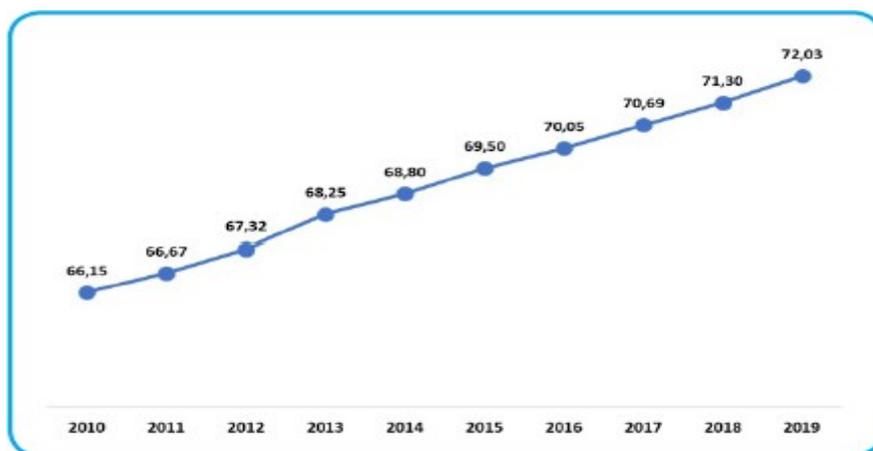
Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat tingkat kemiskinan Jawa Barat tahun 2014-2019 mengalami kenaikan sebesar 0,48%, sementara pada tahun 2015-2019 atau dalam 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami penurunan. Meski begitu, rata-

rata tingkat kemiskinan Jawa Barat masih berada di urutan ketiga setelah DKI Jakarta (7,44%), Bali (8,57%), dan Banten (10,81%) dengan rata-rata sebesar 16,74%. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat merupakan tingkat kemiskinan agregat dari jumlah 16 kabupaten dan 9 kota di wilayah Jawa Barat. Apabila dilihat dari data BPS Jawa Barat, tingkat kemiskinan Jawa Barat yang menunjukkan fluktuasi dan tidak meratanya angka tingkat kemiskinan dari tiap kota/kabupaten di Jawa Barat. Beberapa kota yang tergolong dalam tingkat kemiskinan rendah di wilayah Jawa Barat, antara lain kabupaten Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Kuningan dan Garut yang memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata nasional yakni sebesar 10.0%. Ketimpangan ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam mengurangi taraf kemiskinan ke semua kota/kabupaten di Jawa Barat belum merata. Sehingga, perlu untuk diketahui berbagai faktor yang bisa memengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota, agar bisa dijadikan acuan bagi setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.

Pembangunan daerah pada hakikatnya dianjurkan bukan sebatas pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kemiskinan yang dihasilkan dari adanya proses pembangunan daerah tersebut. Sesuai pemaparan dari Rustam (2010), keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi mempercayai bahwa upaya paling baik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi yakni melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sehingga bisa melewati tingkat

pertumbuhan penduduk. Melalui upaya ini akan dapat meningkatkan angka pendapatan perkapita sehingga secara otomatis akan meningkatkan kemakmuran rakyat.

Malthus dalam Skuosen (2009:85) mengemukakan, sumber daya bumi tidak dapat mengimbangi kebutuhan populasi yang terus meningkat sebab kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas dimana berlawanan dengan jumlah sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Kondisi tersebut memacu manusia mendekati garis kemiskinan sebab ketatnya persaingan dalam memenuhi kebutuhan. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya alam dan persaingan ini, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia bisa diketahui dengan melihat IPM (indeks pembangunan manusia) atau indeks kualitas hidup. IPM (indeks pembangunan manusia) yang rendah dapat menjadikan produktivitas kerja individu juga rendah. Produktivitas yang rendah akan berakibat pada pendapatan serta menjadikan kemiskinan meningkat. Data indeks pembangunan manusia (IPM), dapat diketahui melalui data sebagai berikut:



Gambar 1.1 IPM Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2010-2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah (2020)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Mulai tahun 2010, BPS dalam perhitungan IPM memanfaatkan metode baru. Komponen IPM yang baru meliputi HLS (harapan lama sekolah), RLS (rata-rata lama sekolah), dan AHH (angka harapan hidup). Batasan usia dalam penghitungan RLS sekarang menjadi 25 tahun ke atas (25+) dari yang awalnya 15 tahun ke atas (15+). Jumlah basket komoditi dalam perhitungan pengeluaran per kapita juga berubah, di mana pada metode lama sebatas meliputi 27 komoditas sedangkan kini 96 komoditas. Berdasarkan grafik diatas, dapat terlihat bahwa IPM provinsi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan IPM tersebut menyebabkan naiknya produktivitas kerja seseorang sehingga pendapatan juga meningkat. Jadi, apabila IPM meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakat diduga juga meningkat. Apabila kesejahteraan mengalami peningkatan, akan menjadi berkurang tingkat kemiskinan (Adi Widodo, 2011).

Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan kapital, dan terbatasnya lapangan pekerjaan juga menjadi penyebab timbulnya penduduk miskin. Keterbatasan modal dan pendidikan manusia berhubungan dengan bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupannya. Masyarakat sudah pasti mengharapkan kehidupan yang layak seperti halnya terpenuhinya papan, pangan,

sandang, serta pendidikan guna menjalani hidup. IPM (Indeks pembangunan manusia) menunjukkan pembangunan kualitas hidup manusia sehingga dapat tercapai kehidupan yang layak di atas garis kemiskinan. Indeks pembangunan manusia (IPM) tidak terlepas dari tenaga kerja atau manusia itu sendiri. Tenaga kerja yakni modal bergeraknya roda pembangunan. Pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat tetap harus didukung dengan ketersediaan tenaga kerja, baik itu pekerja kasar atau pekerja ahli.

Tenaga kerja pada hakikatnya terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. persentase angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga turut berkontribusi dalam besar kecilnya tingkat produktivitas masyarakat suatu wilayah. Pada dasarnya, tujuan seseorang bekerja adalah untuk memperoleh penghasilan sehingga bisa dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya. Sampai saat ini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebab ketenagakerjaan dapat menjadi sumber masalah kemiskinan. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang berstatus tidak bekerja lebih banyak, maka akan berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan sebaliknya, jika TPAK meningkat maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yakni sebuah ukuran dimana kerap digunakan melihat fluktuasi dari partisipasi penduduk usia kerja dalam

kegiatan ekonomi. Berikut data perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di provinsi Jawa Barat periode 2014-2019:

Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019

Tahun	TPAK (dalam persen)
2014	62,77
2015	60,34
2016	60,65
2017	63,34
2018	62,92
2019	65,07

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di atas, TPAK mengalami penurunan sebesar 2,43% pada tahun 2015. Meski begitu, TPAK berhasil merangkak naik pada tahun 2016 hingga 2017. Kemudian pada tahun 2018 TPAK mengalami penurunan menjadi 62,92% dari 63,34% pada 2017, dan kembali meningkat di tahun 2019.

Mantra (2003:120) memaparkan, bahwa TPAK yang semakin besar, maka angkatan kerja dalam kelompok yang sama juga semakin besar. Kebalikannya, bertambah besarnya jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka jumlah yang tergolong bukan angkatan kerja semakin besar, dan jumlah angkatan kerja semakin kecil, serta TPAK juga akan semakin kecil.

Tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dikarenakan pendapatan yang rendah, oleh karenanya menjadikan masyarakat lebih menetapkan pilihan untuk bekerja dibanding mengurus rumah tangga dan bersekolah. Keluarga dengan pendapatan yang terbatas cenderung memiliki anggota keluarga yang bekerja daripada mengurus rumah tangga dan bersekolah. Menurut Tjiptono (dalam Fudloli dan Sadikin, 2015: 19), keputusan keluarga yang mewajibkan anak atau istri untuk bekerja akan menjadikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah angkatan kerja meningkat. Kebalikannya, keputusan keluarga yang tidak mengharuskan anak serta istri turut bekerja akan menjadikan tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Uraian tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan yang rendah yang dimiliki penduduk usia kerja dapat menjadikan penduduk lebih memilih bekerja dibanding mengurus rumah tangga atau bersekolah, sehingga semakin banyak jumlah angkatan kerjanya. Banyaknya penduduk yang termasuk angkatan kerja akan memicu peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Inflasi termasuk sebuah indikator makroekonomi yang sangat memengaruhi aktivitas perekonomian.

Inflasi yang tak terbendung dapat mengganggu kestabilan perekonomian serta dapat menjadikan nilai mata uang turun sehingga menekan daya beli masyarakat. Artinya, apabila inflasi naik maka akan ikut naik harga barang - barang umum, kondisi ini menjadikan masyarakat sulit memenuhi kebutuhan harian serta membuat masyarakat seolah-olah menjadi lebih miskin. Inflasi bisa menurunkan

pendapatan riil khususnya untuk kelompok dengan pendapatan tetap. Selama kondisi inflasi, orang dalam kelompok yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan, sebab naiknya harga beberapa jasa dan barang lebih cepat dari upah nominal. Kelas - kelas miskin pun ikut menderita karena upah mereka tetap tetapi harga komoditas terus naik (Oye, 2012). Berikut data inflasi pada provinsi Jawa Barat periode 2014-2019:

Tabel 1.2 Inflasi Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2014-2019

Tahun	Inflasi (dalam %)
2014	7.60
2015	2.73
2016	2.75
2017	3.63
2018	3.54
2019	3.21

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, diolah (2020)

Berdasarkan data tersebut, tingkat inflasi pada provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dengan inflasi terendah berada pada tahun 2015, sementara tertinggi pada tahun 2014. Ketidakstabilan dari sisi moneter ini adalah permasalahan yang cukup serius yang harus dihadapi provinsi Jawa Barat. Meski begitu, laju inflasi provinsi Jawa Barat masih tergolong ringan sebab belum melampaui angka 10%. Sehingga kenaikan harga – harga barang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, dan tidak terpengaruhnya kesejahteraan masyarakat. Terkontrolnya nilai inflasi tidak bisa terlepas dari peran

pemerintah dan tim pengendali inflasi (TPI) dalam menunjang peningkatan produksi, menurunkan distorsi (penyimpangan), dan memperbaiki distribusi berbagai harga khususnya harga pangan.

Besar kecilnya tingkat kemiskinan suatu daerah diantaranya dapat dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan inflasi, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berdasar latar belakang permasalahan diatas, kemiskinan provinsi Jawa Barat pada tahun 2014-2019 secara keseluruhan mengalami penurunan meskipun sempat meningkat pada tahun 2015. Namun, dilihat dari rata-rata tingkat kemiskinannya, dibanding provinsi-provinsi lain di pulau Jawa, Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji lebih dalam dan menuangkannya melalui karya ilmiah dengan judul "**Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2014-2019**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019?

2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, didapat tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019.
2. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan pada suatu daerah yang berasal dari indeks

pembangunan manusia (IPM), tingkat inflasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

- b) Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan penelitian serupa.

b. Manfaat Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini, yaitu sebagai masukan serta pertimbangan bagi pemerintah kota/kabupaten di wilayah provinsi Jawa Barat dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan.